

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA/PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM AKSELERASI PEMENUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme sumber daya manusia pengadaan barang/jasa pemerintah di kementerian/lembaga/pemerintah daerah diperlukan akselerasi pemenuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan pengelolaan akselerasi pemenuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa di kementerian/lembaga/pemerintah daerah diperlukan tim akselerasi pemenuhan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa melalui implementasi rencana aksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Akselerasi Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Implementasi Rencana Aksi;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM AKSELERASI PEMENUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI.

KESATU : Menetapkan Tim Akselerasi Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Implementasi Rencana Aksi yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, anggota yang terdiri dari Sub Tim Penyiapan Regulasi dan Pedoman Rencana Aksi, Sub Tim Penyiapan Aplikasi Renaksi dan Perpindahan Jabatan, Sub Tim Sosialisasi/*Workshop/Bimtek* Rencana Aksi, Sub Tim *Monitoring* dan Evaluasi Rencana Aksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Akselerasi Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui Implementasi Rencana Aksi

mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik di lingkungan dalam maupun luar LKPP.
- KEEMPAT** : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM** : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dan/atau kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,


Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM AKSELERASI
PEMENUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI.
NOMOR : 97 TAHUN 2021
TANGGAL : 28 APRIL 2021

**TIM AKSELERASI PEMENUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI IMPLEMENTASI RENCANA AKSI**

No.	Kedudukan/ Jabatan dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
1.	Pengarah	Roni Dwi Susanto (Kepala LKPP)	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan arahan dan masukan terkait kegiatan Akselerasi Pemenuhan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa melalui Implementasi Rencana Aksi• Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan• Memonitor dan mengevaluasi pencapaian proyek perubahan

No.	Kedudukan/ Jabatan dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
			<ul style="list-style-type: none">• Menerbitkan Peraturan LKPP tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Rencana Aksi Pemenuhan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
2.	Ketua Tim Agile	Robin A.Suryo (Deputi Bidang PPSDM)	<ul style="list-style-type: none">• Menyusun rancangan proyek perubahan beserta jadwal pelaksanaannya• Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan proyek perubahan• Membangun komunikasi dan koordinasi yang efektif dengan pihak-pihak terkait pelaksanaan proyek perubahan• Menyusun laporan Proyek Perubahan

No.	Kedudukan/ Jabatan dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
3.	Sub Tim Penyiapan Regulasi dan Pedoman Rencana Aksi terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Sub Tim • Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • G.A.A. Diah Ambarawaty (Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan) • R. Fendy Dharma Saputra (Direktur Sertifikasi Profesi) • Gatot P. Poetranto (Kapusdiklat PBJ) • Suharti (Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan SDM) • Ria Agustina Nasution (Analisis Kepegawaian Madya) • Windy Dian Trisari (Assessor) 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan masukan terkait substansi proyek perubahan, • Menyusun rancangan peraturan LKPP tentang pedoman penyusunan dan pengelolaan Renaksi, rancangan Keputusan Deputi tentang Pengangkatan JF PPBJ dari Perpindahan Jabatan Lain • Berkoordinasi dengan Kedeputian Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Sekretaris Utama LKPP untuk finalisasi dan penerbitan Peraturan LKPP tentang Pedoman Penyusunan dan

No.	Kedudukan/ Jabatan dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
		SDM Aparatur Madya) <ul style="list-style-type: none"> • Hardi Afriansyah (Widyaiswara Madya) 	Pengelolaan Renaksi; dan Keputusan Deputi tentang Pengangkat JF PPBJ dari Perpindahan Jabatan Lain
3.	Sub Tim Penyiapan Aplikasi Renaksi dan Perpindahan Jabatan Lain <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Sub Tim • Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • G.A.A. Diah Ambarawaty (Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan) • Ria Agustina Nasution (Analisis Kepegawaian Madya) • Anatasia (Analisis Kepegawaian Muda) • Galuh Arini Sasi Kirono (Analisis Sistem Informasi) • Windy Dian Trisari (Assessor 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir penyusunan desain proses bisnis pengelolaan renaksi dan perpindahan jabatan lain • Membangun dan mengembangkan aplikasi Renaksi dan Perpindahan Jabatan • Mengelola aplikasi Renaksi dan Perpindahan Jabatan Lain

No.	Kedudukan/ Jabatan dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
		SDM Aparatur Madya)	
4.	Sub Tim Sosialisasi/Workshop/Bimtek Renaksi <ul style="list-style-type: none"> • Ketua Sub Tim • Anggota 	<ul style="list-style-type: none"> • Gatot P. Poetranto (Kepala Pusdiklat PBJ) • Katmoko Ari Sambodo (Plt. Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur) • Ria Agustina Nasution (Analis Kepegawaian Madya) • Hardi Afriansyah (Widyaiswara Madya) • Muhammad Firdaus (Assessor SDM Aparatur Madya) • Tri Wahyu Widodo (Ketua Umum IFPI) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinir penyiapan bahan sosialisasi dan mendesain media sosialisasi • Menyiapkan target dan jadwal sosialisasi/workshop / bimtek • Berkoordinasi dengan Kemenpan, Dit.Bangprof, Dit.Sertifikasi Profesi dan Pengurus IFPI dalam menyiapkan bahan, target, jadwal dan personil untuk pelaksanaan sosialisasi • Melaksanakan sosialisasi • Melaporkan hasil sosialisasi

No.	Kedudukan/ Jabatan dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
5.	Sub Tim Monitoring dan Evaluasi Renaksi: <ul style="list-style-type: none">• Ketua Sub Tim • Anggota	<ul style="list-style-type: none">• R. Fendy Dharma Saputra (Direktur Sertifikasi Profesi) • Rovazio Okiiza (Analisis Kepegawaian Muda) • Windy Dian Trisari (Assessor SDM Aparatur Madya)	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinir penyiapan pedoman monitoring dan evaluasi Renaksi• Menyiapkan personil pelaksana monitoring dan evaluasi• Melakukan koordinasi dengan Ditbangprof, Pusdiklat, dan Asdep Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi renaksi• Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi Renaksi

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO